

## ABSTRAK

### **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**

Studi Kasus Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Tanah di Desa Batu Cermin,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Triwahyuni Adriana Kadus

NIM: 182114112

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) menurut Mardiasmo tahun 2002 dan hambatan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) menurut Mardiasmo tahun 2002.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMD berupa tanah di Kabupaten Manggarai Barat pada tahap pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas menurut Mardiasmo tahun 2002, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum. Selanjutnya, tahap pengamanan dan pemeliharaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas menurut Mardiasmo tahun 2002, yaitu akuntabilitas proses. Kemudian, tahap pemindahtanganan dan penghapusan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas menurut Mardiasmo tahun 2002, yaitu akuntabilitas kebijakan. Sedangkan, pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemusnahan, dan penatausahaan dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas menurut Mardiasmo tahun 2002, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses dan akuntabilitas kebijakan. Hambatan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BMD berupa tanah terdiri dari pemahaman pejabat pengelolaan BMD yang tidak memahami regulasi, pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa tanah, pemindahtanganan BMD berupa tanah, penghapusan BMD berupa tanah, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD berupa tanah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Tanah.

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCOUNTABILITY PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL PROPERTY PROPERTY (BMD)**

Case Study of Regional Property (BMD) in the form of Land in Batu Cermin Village,  
Komodo District, West Manggarai Regency

Triwahyuni Adriana Kadus  
NIM: 182114112  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta 2022

This study aims to determine the application of the principle of accountability in the management of regional property (BMD) according to Mardiasmo in 2002 and the obstacles in the application of the principle of accountability in the management of regional property (BMD) according to Mardiasmo in 2002.

The type of research is qualitative research with a case study approach. This research uses a case study in Batu Cermin Village, Komodo District, West Manggarai Regency. Data collection techniques used consisted of interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The results of this study indicate that the management of BMD in the form of land in West Manggarai Regency at the stages of securing and maintaining, transferring and deleting is not in accordance with the accountability principle according to Mardiasmo in 2002, namely honesty and legal accountability. Furthermore, the stages of securing and maintaining and developing, monitoring and controlling are not in accordance with the accountability principle according to Mardiasmo 2002, namely process accountability. Then, the transfer and elimination stages are not in accordance with the accountability principle according to Mardiasmo in 2002, namely policy accountability. Meanwhile, at the stage of needs planning and budgeting, procurement, use, utilization, assessment, destruction, and administration are carried out in accordance with the accountability principles according to Mardiasmo 2002, namely honesty and legal accountability, process accountability and policy accountability. Barriers to the application of the accountability principle in the management of BMD in the form of land consist of the understanding of BMD management officials who do not understand the regulations, security and maintenance of BMD in the form of land, the transfer of BMD in the form of land, the abolition of BMD in the form of land, and the guidance, supervision and control of BMD in the form of land.

**Keywords:** Accountability, Management of Regional Property (BMD) in the Form of Land.